

**PELAKSANAAN RULES OF ORIGIN (RoO) ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) TERHADAP EKSPOR MEBEL KAYU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) KAITANNYA DENGAN KETENTUAN RULES OF ORIGIN (RoO) dalam WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)**

**Oleh: Nova Dahani Putri<sup>1</sup>, Prof. M.Hawin, S.H., LL.M., Ph.D<sup>2</sup>**

**INTISARI**

*Rules of Origin* (RoO) yang diatur dalam *ASEAN Trade In Goods Agreement* (ATIGA) adalah ketentuan utama dalam *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) sebagai persyaratan untuk pemberian perilaku preferensial bagi negara anggota AFTA. Semenjak pemberlakuannya pada tahun 2010 Indonesia memanfaatkan RoO ATIGA untuk memperluas pasar ke ASEAN. Salah satunya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk ekspor mebel kayu sebagai komoditi dengan ekspor terbanyak ke ASEAN. Namun jumlah pemanfaatan RoO ATIGA tetap dihitung relatif rendah dibandingkan RoO lainnya. RoO ATIGA dianggap berpotensi menjadi restriktif karena dirasa kompleks sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap perdagangan salah satunya adalah efek menghambat perdagangan. Hal ini berakibat pada kurangnya pemanfaatan RoO ATIGA.

Penelitian ini akan membahas apakah RoO ATIGA bersifat restriktif dengan melihat kesesuaiannya dengan Annex II *Agreement on Rules of Origin* (RoO) dan Article XXIV *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 serta melihat penyebab kurangnya pemanfaatan dari RoO ATIGA untuk ekspor mebel kayu di DIY. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis normatif empiris. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder mendasarkan pada studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, ketentuan RoO ATIGA tidak memenuhi standar kelima yang ditetapkan oleh Annex II ARoO namun ketentuan lain telah berkesesuaian dengan standar dalam Annex II ARoO. Kedua, ketentuan RoO ATIGA yang diterapkan oleh Indonesia telah sesuai dengan Article XXIV GATT 1994. Ketiga, kurangnya pemanfaatan RoO ATIGA untuk ekspor mebel kayu di DIY disebabkan karena pengurusan Surat Keterangan Asal (SKA) Form D yang dianggap kompleks dan pasar ASEAN yang tidak terlalu menjanjikan untuk ekspor mebel kayu.

*Kata kunci: Rules of Origin (RoO), ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), Ekspor, World Trade Organization (WTO), Article XXIV GATT 1994*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Departemen Hukum Dagang di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**THE IMPLEMENTATION OF ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)'s RULES OF ORIGIN (RoO) TOWARDS WOODEN FURNITURE EXPORT AT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) IN LIGHT OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) PROVISIONS ON RULES OF ORIGIN (RoO)**

**By: Nova Dahani Putri<sup>3</sup>, Prof M.Hawin, S.H., LL.M., Ph.D<sup>4</sup>**

**ABSTRACT**

ATIGA's RoO is a key provision in *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*. Members have to fulfill ATIGA's RoO provision as a requirement to get preferential treatment. Since the enforcement of ATIGA in 2010, Indonesia started to utilize ATIGA's RoO to expand their export market to ASEAN. Central Bureau of Statistics' data shown that Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) has played a huge role on non-oil products export to ASEAN. The main commodity of DIY's export is wooden furniture. However, Department of Industry and Trade DIY's data indicate the low utilization rate of ATIGA's RoO. In addition to that, ATIGA's RoO considered to be trade restrictive because the complexity of their provision. The restrictiveness of ATIGA's RoO creates the trade-inhibiting effects and resulting the low utilization rate.

This research is aimed to discuss the restrictiveness of ATIGA's RoO by analyze it compliance with Annex II Agreement on Rules of Origin (ARoO) and Article XXIV General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, and to observe the factor that caused the low utilization of ATIGA's RoO on wooden furniture export at DIY. This thesis used descriptive research with normative empirical legal research approach. The type of data used in this writing area primary data obtained through field research and secondary data based on literature study.

The result of this legal research shown: First, ATIGA's RoO provision is not in accordance with the fifth standard that stipulated by Annex II ARoO but the other provision is consistent with Annex II ARoO. Second, ATIGA's RoO provision that applied by Indonesia is comply with Article XXIV GATT 1994. Third, the low utilization of ATIGA's RoO on wooden export at DIY is caused by the complexity of Certificate of Origin (CoO) Form D and the ASEAN market is not too promising for wooden furniture export.

---

<sup>3</sup> Undergraduate Student of Business Law Departement in Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>4</sup> Lecturer at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada